

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ajie, H. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, F. (1997). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arba, H. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta: Erlangga.
- Grindle, M. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- HS, H. Salim. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamali, A. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhammad, A. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Purnamasari, I. D. (2014). *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa.
- Putra, E. (1989). *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Setiawan, I. O. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno. (2005). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanuwidjaja, H. (2012). *Pranata Hukum Jaminan Hutang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung: Refika Aditama.
- Usman, A. H. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Palembang: Tunas Gemilang.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibawanti, E. S., & Murjiyanto, R. (2013). *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty.

## **Jurnal**

Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. *Administrative, Law & Governance Journal*, Vol. 2(No. 3).

Arisaputra, M. I., Ashri, M., Abdullah, K., & Mas Bakar, D. U. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 2.

Dewi, I. (2020). Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia. *Law, Development & Justice Review*, Vol. 3(No. 1), 57-69.

Doly, D. (2011). Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Hadiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal AHKAM*, Vol. 2 No.1.

Huang, J. (2017). Evolution and consequences of China's rural land institutional reform. *Journal of Law and Rural Development*, 1(1).

Imanda, N. (2020). Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Journal Notarie*, Vol. 3(No. 1).

Intan, S. N., & Rizkianti, W. (2019). Studi Komparatif Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Bogor dan Kota Depok. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6(No. 2), 118-135.

Nurjanah Siti. (2018). Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis). *Jurnal Hukum*, Vol. 5(1).

Pratama, R. P. (2016). Keberlakuan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Telah Habis Jangka Waktu. *Jurnal Hukum Program Studi Magister Kenoariatan Universitas Sriwijaya*.

Samuel, D. J. (2020). Application of active remote sensing in confirmation rights and identification of mortgage supply-demand subjects of rural land. *European Journal Of Remote Sensing*.

- Suwandi, D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan. *Journal Media Iuris*, Vol. 1(No. 3).
- Wiguna, I. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5(No. 1), 79-88.
- Zulfikar, A. (2019). Kekuatan Hukum Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017. *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 3(No. 2), 110-120.

### **Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

### **Artikel**

- Fauzian, R. (2020). Hak Tanggungan Elektronik Mulai Berlaku Di Indonesia, Medcom.id diunduh dari <https://www.medcom.id/properti/news-properti/Dkq7Zd6N-hak-tanggungan-elektronik-mulai-berlaku-di-indonesia> [Diakses pada tanggal 12 Juli 2020]
- Frandoni, A. (2019). Hak Tanggungan Secara Elektronik, Kenny Wiston Law Office diunduh dari <https://www.kennywiston.com/hak-tanggungan-secara-elektronik/> [Diakses pada tanggal 5 Juni 2020]

Praditya, I. (2019). BTN Jadi Pilot Project Layanan Hak Tanggungan Elektronik, Liputan 6 diunduh dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4055215/btn-jadi-pilot-project-layanan-hak-tanggungan-elektronik> [Diakses pada tanggal 28 Maret 2020]

Siregar, E. (2019). Tanpa Locket, BPN Bikin Layanan Online Buat Hak Tanggungan, CNBC Indonesia diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190925115641-4-102092/tanpa-loket-bpn-bikin-layanan-online-buat-hak-tanggungan> [Diakses pada tanggal 9 Juni 2020]

### Skripsi

Endah, S. (2013). *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Sebagai Implementasi Asas Publisitas Dalam Hak Tanggungan*. (Skripsi Dipublikasikan). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

